



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia, pemerintah Kelurahan merupakan suatu bagian dari organisasi pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijaksanaan – kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah di bawahnya. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung pada sejarah nama partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Kelurahan/Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Implementasi otonomi daerah bagi desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pola beban tanggungjawab dan kewajiban desa namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dalam mengelola anggaran desa, program-program bantuan yang masuk, serta membuat laporan. Dalam pengelolaan bantuan dan anggaran yang dikelola haruslah transparan agar tidak terjadinya penyalahgunaan yang tidak diinginkan. Kepala desa yang berfungsi sebagai pengelola dan menentukan arah jalan suatu program pemerintahan harus bisa memprogramkan anggaran desa yang semestinya diberikan oleh masyarakat yang memang layak untuk diberikan dan meratanya bantuan yang turun. Serta berdasarkan hal tersebut, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budayanya.



Khusus di Indonesia Pemerintah kian sigap membantu meringankan masyarakat khususnya untuk warga yang kurang mampu. Pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin.

Ada beberapa kriteria masyarakat miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain ; Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang; Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain; Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan; Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu; hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan; Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, enas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 6 kriteria terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikategorikan masyarakat miskin.



Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 kelurahan yang tersebar, terdapat satu kelurahan/desa yaitu Kelurahan Tiga Ilir. Di Kelurahan ini termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu (Miskin), setiap tahunnya petugas dari lurah harus mendata warga yang kurang mampu yang sebelumnya didata oleh setiap RT/RW untuk selanjutnya direkap berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama Kepala Keluarga, Kartu Keluarga (KK), dan jumlah penghasilan setiap bulannya dan akan dikirim ke kecamatan. Dari kecamatan dilanjutkan ke kabupaten/kota dari kabupaten/kota dilanjutkan lagi ke dinas sosial, serta instansi-instansi pemerintahan yang terlibat. Akan tetapi, dari pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas desa yang turun langsung masih menggunakan sistem manual yakni, dengan melakukan pengumpulan data dari masyarakat yang membutuhkan, ini disebabkan tidak adanya database yang menyimpan data-data tersebut. Dari masalah di atas muncul berbagai penyebab yang bisa menghambat proses penginputan data masyarakat, seperti keterlambatan mengirim data, serta memungkinkan adanya pembagian bantuan masyarakat miskin yang tidak sama rata. Formula solusi yang ditawarkan dalam mengatasi hal tersebut yaitu, dengan mengatasi kecemburuan antar masyarakat yang mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan, serta mengatasi adanya penyalahgunaan tanggung jawab oleh petugas yang menangani bantuan-bantuan yang ditujukan pada masyarakat kurang mampu (Miskin).

Masalah pengelolaan bantuan masyarakat miskin haruslah dioptimalkan dan diproses secara transparan agar masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan bisa cepat diproses dan di bagi rata sebagaimana mestinya. Dengan adanya aplikasi manajemen kependudukan dan bantuan sosial berbasis website sangatlah diperlukan untuk mengurangi keresahan dan kesalahan-kesalahan dalam mengatasi penginputan data. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah sangatlah transparan dan bisa dipantau langsung oleh masyarakat. Selain itu dengan adanya aplikasi pengelolaan data bantuan sosial website ini, pemerintahan dapat mengetahui jumlah masyarakat miskin serta bantuan apa saja yang layak untuk diberikan kepada masyarakat tersebut.



Dalam mewujudkan solusi tersebut, penulis bermaksud ingin membangun sebuah aplikasi yang dijadikan sebuah Laporan Akhir dengan judul “**Aplikasi Pengelolaan Data Bantuan Sosial Berbasis Website pada Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masalah yang ada yaitu :

1. Belum adanya sebuah aplikasi berbasis website yang mempermudah pegawai untuk melakukan pengelolaan data bantuan sosial pada Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang.
2. Proses Pengelolaan data masih dilakukan secara manual dan belum mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang.
3. Aplikasi ini berisikan informasi data-data penduduk yang menerima bantuan serta jenis-jenis bantuan apa saja yang diprogramkan pemerintah.

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan Laporan Akhir agar lebih terarah dan tidak menyimpang dengan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pokok permasalahan menjadi beberapa hal berikut :

1. Aplikasi hanya dapat diakses oleh pegawai Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang
2. Aplikasi berbasis *web* ini dibangun dengan menggunakan bahasa Pemrograman *PHP* dan basis data *MYSQL*.
3. Aplikasi ini berisikan informasi data-data penduduk yang menerima bantuan yang diprogramkan pemerintah.



## 1.4 Tujuan dan Manfaat

### 1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah :

1. Penulis ingin membahas dan memberikan solusi terhadap kesulitan yang di hadapi oleh pengurus dan petugas dalam mengelola data bantuan sosial pada Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang.
2. Membangun sebuah Perancangan aplikasi Pengolahan Data Bantuan Sosial berbasis *website* pada Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang untuk mengolah data penerima bantuan sosial tersebut yang masih manual dan belum terintegrasi ke dalam sistem menjadi digital sehingga dalam mengelola data dan penyimpanan data bantuan sosial tersebut dapat dilakukan agar lebih efisien.
3. Menghindari terjadinya kesalahan dalam mengolah data dan menghasilkan data yang valid dan mempercepat proses pengelolaan data bantuan sosial pada Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang

### 1.4.2 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi Kantor Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang, agar memetik manfaat dari perkembangan teknologi informasi.
2. Memberikan kemudahan bagi petugas atau admin dalam mendata dan mengelola bantuan sosial pada Kantor Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang.
3. Mempermudah dalam mengelola bantuan sosial karena data tersebut dimasukkan kedalam database sehingga lebih efektif dan efisien.



## **1.5 Metodologi Pelaksanaan Laporan Akhir**

### **1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data**

Data yang didapatkan berasal dari kantor Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang. Sehingga lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa metode untuk pengumpulan data dilakukan untuk memperlengkap dan mempertegas data yang dibutuhkan dalam pembuatan Aplikasi Pengelolaan Data Bantuan Sosial pada Kelurahan Tiga Ilir Kota Palembang Berbasis *Website*.

1. Metode Pengamatan (Observasi)

Penulis melakukan survei dan pengamatan langsung di instansi tersebut, dan melakukan pengamatan secara langsung.

2. Metode Wawancara

Metode ini biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber secara langsung. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan data dari hasil observasi. Masing-masing pihak dapat mengajukan maupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang dibahas.

3. Penelitian Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis di perpustakaan untuk mendapatkan data yang teoritis. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah subjek yang diteliti, yaitu khususnya pada buku bacaan yang menjadi pembahasan dan saling keterhubungan dalam permasalahan yang dihadapi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan laporan kerja praktik ini memberikan gambaran jelas dan tujuan yang sesuai, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:



## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai Laporan Akhir ini secara garis besar dengan singkat dan jelas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan pada Laporan ini. Secara garis besar tinjauan pustaka ini akan membahas mengenai pengertian yang berkaitan dengan teori umum, teori judul, dan teori program yang berkaitan dengan aplikasi yang akan dibuat.

## **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang sejarah singkat berdirinya Dinas Perdagangan Kota Palembang , Visi dan Misi , Struktur Organisasi, serta uraian Tugas Pokok

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai pembangunan aplikasi pengelolaan data bantuan sosial pada Kelurahan 3 Ilir Kota Palembang berbasis *website*.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi point-point dari berbagai hal yang telah dibahas pada bab sebelumnya menjadi sebuah kesimpulan. Selain itu pada bab ini juga terdapat beberapa saran dari penulis terkait dengan isi laporan.